

Mencapai Pembangunan Indonesia Berkelanjutan Melalui Digitalisasi dan Green Economy



Fitri Juniwati Ayuningtyas, S.E., M.Ec.Dev
Sekretaris Prodi Ekonomi
Universitas Amikom Yogyakarta

PEMERINTAH Indonesia mendorong agar pariwisata berkelanjutan dapat membangkitkan kembali industri pariwisata dan industri kreatif lokal pasca pandemi Covid-19. Konsep pariwisata berkelanjutan diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena

sektor pariwisata kedepannya memiliki peluang besar dalam meningkatkan lapangan kerja. Pariwisata berkelanjutan ini merupakan bagian dari inovasi green economy untuk pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan arah pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Konsep green economy bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan perekonomian nasional melalui upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan angka kemiskinan, kegiatan ekonomi rendah karbon, peningkatan ketahanan bencana serta penghematan sumber daya. Penerapan konsep green economy mengacu pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan yang mencakup pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan guna mencapai tujuan pembangunan masyarakat dan stabilitas sosial dan lingkungan.

Green economy dapat diterapkan pada sebagian besar sektor ekonomi terutama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang berkontribusi paling besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 7,8 persen pada tahun 2022. Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor kuliner, fesyen, dan kriya menjadi sektor utama unggulan ekonomi kreatif. Sektor-sektor ini juga menempatkan Indonesia pada peringkat tiga besar dunia dalam memberikan kontribusi terhadap PDB setelah Amerika Serikat dengan Hollywood dan Korea Selatan dengan K-Pop. Tingginya minat masyarakat terhadap green economy mendorong pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan jumlah tenaga kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah melalui green tourism. Konsep green tourism mengajak wisatawan tidak hanya

sekedar menikmati wisata, namun juga ikut bertanggungjawab dalam melestarikan lingkungan, budaya, dan kearifan lokal yang terdapat di masing-masing daerah. Sejauh ini pariwisata Indonesia hanya sebatas pada rombongan wisatawan yang hanya sekedar melihat-lihat dan bertanya-tanya, namun saat ini harus lebih dikembangkan lagi agar rombongan wisatawan bisa berbelanja berbagai produk lokal daerah. Oleh karena itu pemerintah mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk terus melakukan inovasi dalam menghasilkan produk kreatif. Produk-produk ini kemudian dipasarkan melalui online mampu memperluas peluang dan jangkauan pasar serta memiliki daya saing yang unggul. Pemerintah melalui Bank Indonesia juga meluncurkan sistem pembayaran berupa Quick Response Indonesia Standar Code (QRIS) untuk mendukung pengembangan UMKM dan

ekonomi kreatif. Penerapan QRIS ini juga semakin diperluas dengan adanya QRIS Cross Border yang diterapkan di beberapa negara seperti Thailand dan Singapura untuk memberikan kemudahan wisatawan mancanegara dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu menukarkan mata uang saat berbelanja di negara tujuan. Penggunaan BI Fast Payment diperlukan untuk mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan guna mencapai pemulihan ekonomi nasional. Upaya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan juga dapat dilakukan melalui penetapan berbagai kebijakan termasuk kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan dan perubahan iklim. Kebijakan fiskal diarahkan untuk memberikan stimulus terhadap pembiayaan pembangunan hijau seperti pengembangan energi terbarukan, green tourism, green building,



sustainable transportation, sustainable agriculture, serta waste management. Pemerintah dan Bank Indonesia juga memiliki peran penting untuk ikut mendukung ekonomi hijau dan berkelanjutan melalui instrumen pasar uang hijau dan berkelanjutan (Green and Sustainable Money Market Instrument) di Indonesia yang berkonsep environment, social, and governance (ESG) berupa obligasi hijau, obligasi sosial dan obligasi berkelanjutan lainnya. Kebutuhan instrumen keuangan hijau ini masih harus dikembangkan untuk mencapai sustainable development goals (SDGs). Kebijakan lain yang turut mendukung pengembangan pembangunan hijau antara lain pembiayaan hijau dan inklusif untuk UMKM serta ekonomi dan keuangan syariah yang berkelanjutan.



KR-Surya Adi Lesmana

BERLIBUR KE KALIURANG: Kunjungan wisatawan ke Tlogo Putri Kaliurang Sleman mengalami peningkatan, Minggu (4/6/2023). Sejumlah wahana yang bersahabat untuk keluarga, menjadi daya tarik sehingga masyarakat dan wisatawan asal luar DIY memilih Kaliurang untuk menghabiskan masa liburan.

TUNGGU DISAHKAN OLEH BUPATI

Sleman Berencana Terapkan Lima Hari Sekolah

SLEMAN (KR) - Kebijakan lima hari sekolah yang telah diterapkan di sejumlah daerah, rencananya juga bakal diberlakukan di Kabupaten Sleman. Artinya, kebijakan yang telah diterapkan dengan enam hari sekolah bakal menjadi lima hari sekolah atau Senin sampai Jumat.

Kepala Dinas Pendidikan Sleman Ery Widaryana kepada KR, Minggu (4/6) membenarkan adanya wacana untuk mengubah hari belajar dari enam hari menjadi lima hari. Perubahan waktu belajar itu dilakukan berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) serta Peraturan Presiden (Perpres).

"Sehingga, kami ingin menyinkronisasikan kebijakan itu. Apalagi birokrasi kami kan hanya sampai lima hari kerja, Senin-Jumat saja dan Sabtu libur, sedangkan anak-anak sekolah dan tenaga pengajar masuk. Jadi, kami ingin semua sistem itu bisa sinkron dan bisa mendapatkan pelayanan dari Disdik dengan maksimal," jelasnya.

Dengan adanya rencana perubahan hari belajar atau masuk sekolah di Kabupaten Sleman tersebut otomatis diikuti dengan wacana perubahan jam belajar. Jam belajar bagi siswa sekolah dasar (SD)

yang awalnya mulai pukul 07.00-12.00 WIB menjadi pukul 07.00-13.50 WIB dan waktu belajar bagi siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang awalnya mulai pada pukul 07.00-13.30 menjadi pukul 07.00-14.30 WIB. "Itu semua sudah masuk sama kegiatan ekstrakurikuler," ujarnya.

Namun demikian, Ery menyebut wacana tersebut akan didiskusikan terlebih dahulu bersama Bupati Sleman dan beberapa instansi terkait dalam waktu dekat ini. nantinya apa yang menjadi hasil dari diskusi tersebut, akan disahkan oleh Bupati Sleman dan diterapkan oleh Pemkab Sleman.

"Kami menargetkan penerapan perubahan tersebut dapat disahkan pada Juni 2023, menimbang

adanya tahun ajaran baru yang akan berlangsung pada pertengahan Juli 2023. Kami juga sudah menyampaikan wacana tersebut kepada pihak-pihak sekolah. Jadi kalau misalkan keputusan itu sudah disahkan, pihak-pihak sekolah di Kabupaten Sleman sudah siap menerapkan kebijakan yang baru. Sejauh ini respons sekolah-sekolah bagus. Mereka menerima. Termasuk ketua komite di masing-masing sekolah," beber Ery.

Melalui kebijakan yang hendak dilaksanakan, tambah Ary, diharapkan mampu memaksimalkan sistem pelayanan Disdik Sleman sekaligus meningkatkan moto pendidikan dan penguatan pendidikan karakter lebih baik di wilayah kerjanya. **(Has)-f**

Warga Lojajar Bangun Drainase Rp 190 Juta

NGAGLIK (KR) - Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menghadiri pentas karawitan di Padukuhan Lojajar Kalurahan Sinduharjo Ngaglik, Minggu (4/6). Sekaligus meresmikan drainase di padukuhan setempat.

Danang mengapresiasi diadakannya pentas karawitan oleh pemuda Padukuhan Lojajar tersebut. Kegiatan tersebut adalah langkah yang baik guna melestarikan kebudayaan tradisional.

"Terlebih di tengah kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat seperti saat ini, maka kebudayaan tradisional harus kita lestarikan. Saya senang karena pemain karawitannya juga masih muda-muda," ujarnya.

Sementara terkait peresmian drainase milik warga, menurut Danang, pembangunan drainase ini merupakan tindak lanjut dari laporan warga setempat. Dengan adanya drainase

baru tersebut diharapkan dapat membantu permasalahan masyarakat.

"Dulu saya dapat laporan di sini sering banjir kalau hujan, karena drainase tidak berfungsi dengan baik. Maka saya arahkan untuk membuat proposal, dan akhirnya bisa turun bantuan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK)," jelasnya.

Sementara Dukuh Lojajar Drajat Giri Pawoko menyebut kegiatan pagi tersebut terdiri dari dua agenda,

yakni pentas karawitan dan peresmian drainase. Pentas karawitan dibawakan oleh kelompok Karawitan Sekar Pareanom.

Sedangkan untuk pembangunan drainase, sudah dimulai sejak awal tahun 2023, namun baru diresmikan sekarang. Pembangunan drainase ini dilakukan secara gotong royong dengan anggaran sebesar Rp 190 juta yang berasal dari Pemkab Sleman. **(Has)-f**



KR-Istimewa

Wabup Danang Maharsa disambut tarian saat berkunjung di Lojajar.

Tiga Lurah Raih Paralegal Justice Award

SLEMAN (KR) - Tiga lurah di Sleman menerima penghargaan dalam acara Paralegal Justice Award dari Kementerian Hukum dan HAM di Discovery Hotel Jakarta. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sebanyak 795 lurah/kepala desa yang mendaftar, telah tersaring 300 lurah/

kepala desa yang berhak mengikuti pembinaan dan pendidikan paralegal selama 4 hari, yakni mulai 29 Mei-1 Juni 2023 di Jakarta. Paralegal Justice Award diberikan dalam dua kategori yakni penghargaan Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita.

Dari 294 lurah/kepala desa sebagai penerima Paralegal Justice Award, terdapat 2 lurah dari Sleman DIY yang menerima penghargaan tersebut, yakni

Lurah Condongcatur Reno Candra Sangaji dan Lurah Banyurejo Saparjo. Kemudian satu lurah yang menerima Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita adalah Lurah Tamanmartani, Gandang Hardjanata. Tak hanya itu, dari 10 penerima penghargaan Lurah/Kepala Desa Terfavorit melalui online voting, terdapat lurah dari Sleman yang menerima penghargaan, yaitu Lurah Banyurejo, Saparjo sebagai Lurah Terfavorit ke 5.

"Kabupaten Sleman turut berbangga atas prestasi yang diraih para lurah di DIY dalam Anugerah Paralegal Justice Award. Kabupaten Sleman berkomitmen mendorong lebih banyak terbentuknya Kelurahan/Kalurahan Sadar Hukum untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat," ungkap Kadinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (PMK) Sleman Samsul Bakri, Minggu (4/6). **(Has)-f**



KR-Istimewa

Ketiga lurah penerima Paralegal Justice Award.

LAPORAN PANSUS II DPRD KABUPATEN SLEMAN

Bantuan Tepat Sasaran dan Sesuai Kebutuhan Warga Miskin

SLEMAN (KR) - DPRD Kabupaten Sleman sekarang ini sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur tentang Penanggulangan Kemiskinan. Hal itu dikarenakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 dinilai sudah tidak relevan. Raperda ini nantinya diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara tuntas.

Ketua Pansus II DPRD Sleman tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda No 1 Tahun 2017 Respati Agus Sasangka SIP mengatakan, dalam pengentasan kemiskinan itu bukan hanya sebatas memberikan bantuan sosial saja. Namun bagaimana memberikan pemberdayaan kepada warga miskin maupun rentan miskin.

"Kalau bantuan sosial itu sifatnya hanya sementara dan hanya memenuhi kebutuhan dasar saja. Tapi kalau pember-

dayaan bisa permanen dan mereka bisa mandiri secara ekonomi," kata Respati atau yang kerap disapa Ade ini, Minggu (4/6).

Dalam pemberdayaan itu, lanjut Ade, pemerintah tidak bisa hanya memberikan pelatihan dengan satu jenis saja. Namun harus disesuaikan dengan minat dan bakat dari warga miskin maupun rentan miskin tersebut.

"Tidak bisa dong dipukul rata. Dari 10 warga miskin itu, mungkin bisa jadi 10 solusi. Jadi harus disesuaikan minat dan bakat mereka supaya pemberdayaan itu efektif dan efisien," ujar anggota Komisi D ini.

Menurut Ade, pemerintah daerah harus mengawalinya dengan menyusun data tunggal kemiskinan versi Sleman. Tidak terpatok data Badan Pusat Statistik atau sumber lain. Versi lokal akan lebih akurat. Sehingga bentuk bantuan yang diberikan bisa lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan penerima man-



KR-Saifullah Nur Ichwan

Respati Agus Sasangka SIP

faat.

"Dengan memiliki data yang valid, pemerintah akan mudah menentukan kebijakan. Sehingga program penanggulangan kemiskinan ini tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga miskin," tegas politisi dari Fraksi PAN ini.

Raperda inisiatif yang sedang digodok dewan itu juga mendorong pemerintah daerah melibatkan pihak lain secara masif dalam penanggulangan kemiskinan. Misalnya perguruan tinggi,

lembaga swadaya masyarakat, hingga perusahaan swasta melalui program corporate social responsibility (CSR).

"Penanggulangan kemiskinan itu butuh pendampingan jangka panjang secara spesifik. Jadi keterlibatan dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan swasta itu cukup penting," katanya.

Selanjutnya dalam pelaksanaan program, pemerintah harus mengetahui kondisi tiap calon penerima manfaat untuk menentukan skema kebijakan yang akan diputuskan. Hal ini perlu ada kajian tentang bagaimana calon penerima manfaat bisa keluar dari garis kemiskinannya.

"Di situlah perlunya pendampingan dari perguruan tinggi. Apakah mereka itu benar-benar miskin atau hanya merasa miskin. Kalau benar-benar miskin, kebijakan apa yang paling tepat agar mereka bisa bebas dari jurang kemiskinan," tambah Ade, politisi dari Dapil Mlati dan Gamping ini. **(Sni)-f**



KR-Istimewa

Pansus II DPRD Kabupaten Sleman studi banding ke Surabaya.